

# Jurnal\_Nasional- Analisis\_Realisasi\_Anggaran.pdf f

*by* Ascarya Solution

---

**Submission date:** 16-Nov-2023 01:29AM (UTC-0500)

**Submission ID:** 2195357480

**File name:** Jurnal\_Nasional-Analisis\_Realisasi\_Anggaran.pdf (204.07K)

**Word count:** 4355

**Character count:** 27743



**Jurnal Kompetitif : Media Informasi Ekonomi Pembangunan,  
Manajemen dan Akuntansi**  
**Vol. 9 No. 2, September 2023 ISSN 2460-5298, Dan E-ISSN 2621-  
6620, (1-17).**

**ANALISIS REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI EFEKTIVITAS  
DAN EFISIENSI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KOTA  
MATARAM**

**Fathurrahman<sup>1</sup>, Baiq Dewi Lita Andiana<sup>2</sup>, Triana Lidona Aprilani<sup>3</sup>, Farah  
Zihatul F<sup>4</sup>**

**<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Islam Al-Azhar**

**Email : dewilita123@gmail.com**

**6**

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze how the realization of the budget in assessing the effectiveness and efficiency of performance at the three Mataram City Regional Government Agencies. Where effectiveness is a measure of the success or failure of an organization in achieving its goals while efficiency is a measurement of achieving maximum output with the lowest possible use of resources and funds. The type of research used in this research is descriptive quantitative. The population in this study was all SKPD in Mataram City. Meanwhile, the samples used were three Mataram City Regional Government Agencies, namely: 1) Regional Development Planning Agency, 2) Youth and Sports Service, and 3) Social Service. The data used in this study is secondary data in the form of audited company annual financial reports. These data were obtained from the official website of the Mataram City Government, such as LRA from 2020- 2022 in each agency. The research results for the level of effectiveness in 2020-2022 are all in the effective category because the results of achieving an effectiveness level of more than 80 percent, can be said to be good and meet predetermined criteria. The research results for the efficiency level in 2020-2022 are all in the efficient category, said to be efficient because the efficiency level is 60-80 percent.*

*Keywords: Budget, Performance, Effectiveness, and Efficiency.*

**PENDAHULUAN**

Saat ini dengan waktu yang relatif singkat akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang pesat. Akuntansi sektor publik mendapat perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah, badan umum milik negara atau daerah, dan organisasi publik lainnya dibandingkan pada masa sebelumnya. Sektor publik memiliki tugas dan fungsi tersendiri yang dapat dijalankan oleh sektor swasta



**Jurnal Kompetitif : Media Informasi Ekonomi Pembangunan,  
Manajemen dan Akuntansi**  
**Vol. 9 No. 2, September 2023 ISSN 2460-5298, Dan E-ISSN 2621-  
6620, (1-17).**

seperti menghasilkan beberapa jenis pelayanan publik yaitu layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik, dan lain sebagainya tetapi dalam tugas tertentu sektor swasta tidak dapat menggantikan posisi sektor publik seperti fungsi birokrasi pemerintah. Sektor publik dapat diartikan sebagai sektor pelayanan yang menyediakan barang dan jasa untuk masyarakat umum dengan sumber dana yang berasal dari pajak dan pendapatan pajak lainnya, dimana kegiatannya sudah diatur dari peraturan yang berlaku (Rai, 2009). Hal ini menumbuhkan rasa keinginan masyarakat adanya pemerintahan yang bersih (*good governance*) dan adanya akuntabilitas publik di instansi pemerintahan.

Pengertian *good governance* dapat diartikan sebagai cara pengelolaan urusan publik dan atau pemerintahan yang baik. Setelah era reformasi dan pengelolaan urusan publik yang lebih luas, mengakibatkan semakin kuat tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintah yang baik menuju pada terwujudnya *good governance*, sebab *good governance* telah menjadi suatu paradigma baru yang sangat didambakan masyarakat. Mewujudkan *good governance* diperlukan perubahan kegiatan pemerintah yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistik, dimana pemerintah pusat menciptakan aturan yang harus ditaati oleh pemerintah daerah dalam menciptakan kebijakan. Perlu adanya paradigma baru untuk mengurangi ketergantungan kebijakan pemerintah pusat, mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dengan meminta bantuan kepada pemerintah pusat tanpa dijalani langsung oleh pemerintah daerah.

Pemerintah memberikan otonomi kepada pemerintah daerah agar supaya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan dapat mensejahterakan rakyat. Adapun aspek terpenting yang mendukung otonomi daerah adalah penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Kылchova (2014) Anggaran adalah suatu proses perencanaan kegiatan bisnis masa depan yang hasilnya didokumentasikan dengan sistem anggaran. Anggaran dapat dianggap sebagai instrumen perencanaan dan



**Jurnal Kompetitif : Media Informasi Ekonomi Pembangunan,  
Manajemen dan Akuntansi**  
**Vol. 9 No. 2, September 2023 ISSN 2460-5298, Dan E-ISSN 2621-  
6620, (1-17).**

pengendalian operasi keuntungan dalam organisasi laba dimana tingkat budget bergantung pada kapasitas organisasi. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan pemerintah daerah mampu membiayai kegiatan pelaksanaan infrastuktur, untuk itu pemerintah daerah dituntut membangun kinerja yang baik. Ukuran kinerja tidak dapat diukur hanya satu ukuran kinerja saja, perlu adanya ukuran kinerja untuk tujuan yang berbeda. Kinerja diukur melalui penggunaan pengukuran kinerja dimana suatu matrik digunakan untuk mengkuantifikasi efisiensi atau efektivitas dari suatu kegiatan (Matthew, 2011).

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah daerah telah menerapkan partisipasi setiap satuan satuan kaerja dalam penyusunan anggaran SKPD yang memuat di Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang biasa disebut RKA SKPD. Dalam RKA SKPD, masing-masing SKPD telah memuat indikator –indikator kinerja yang akan dicapai untuk setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sedangkan RKA memuat input, output dan outcome dari masing-masing program dan kegiatan. Jadi dalam RKA memuat sasaran anggaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta semakin dipertegas melalui Pasal 54 ayat (2) yang menyatakan bahwa pelaksanaan belanja daerah harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Efektivitas dan efisien diartikan sebagai pengukur keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jika sebuah tugas dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif. Efisiensi merupakan kriteria efektivitas mengacu pada ukuran penggunaan sumber daya langka dari organisasi. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13



**Jurnal Kompetitif : Media Informasi Ekonomi Pembangunan,  
Manajemen dan Akuntansi**  
**Vol. 9 No. 2, September 2023 ISSN 2460-5298, Dan E-ISSN 2621-  
6620, (1-17).**

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 4 ayat (4) menjelaskan bahwa efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Sedangkan efisien pada ayat (5) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

Penelitian ini dilakukan pada tiga Instansi Pemerintah Daerah Kota Mataram yakni: (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, (2) Dinas Kepemudaan dan Olahraga, (3) Dinas Sosial. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan sebuah instansi yang didirikan dengan tugas pokok merencanakan, menetapkan, menyelenggarakan, mengkoordinasikan, melaporkan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Dinas Sosial merupakan instansi pemerintah yang memiliki peran dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perorangan, kelompok dan masyarakat. Oleh sebab itu dengan mengetahui laporan realisasi anggaran kegiatan, peneliti dapat mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran kegiatan apakah seluruh kegiatan di tiga instansi tersebut sudah terlaksana dengan baik.

## **LANDASAN TEORI**

### **Pengertian Anggaran**

Anggaran merupakan alat akuntansi yang dapat membantu pimpinan perusahaan dalam merencanakan dan mengendalikan operasi perusahaan. Anggaran memperlihatkan bagaimana sumber daya yang diharapkan akan diperoleh dan dipakai selama periode waktu tertentu. Anggaran juga digunakan untuk mengarahkan suatu kegiatan dan juga sebagai alat perbandingan dalam



**Jurnal Kompetitif : Media Informasi Ekonomi Pembangunan,  
Manajemen dan Akuntansi**  
**Vol. 9 No. 2, September 2023 ISSN 2460-5298, Dan E-ISSN 2621-  
6620, (1-17).**

mengukur hasil pelaksanaan kegiatan, sehingga proses pelaksanaan terkendali.

#### **Anggaran Sektor Publik**

Mardiasmo (2009) menyatakan anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang. Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama yaitu: (1) Anggaran sebagai alat perencanaan, (2) Anggaran sebagai alat pengendalian, (3) Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal, (4) Anggaran sebagai alat politik, (5) Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi, (6) Anggaran sebagai alat penilaian kinerja, (7) Anggaran sebagai alat motivasi, dan (8) Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik.

#### **Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

##### **1. Konsep Belanja Pemerintah**

Standar Akuntansi Pemerintahan SAP menyatakan Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Definisi lain Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.59 Tahun 2007 dan adanya perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua, belanja dikelompokkan menjadi:

##### **a. Belanja Langsung**



**Jurnal Kompetitif : Media Informasi Ekonomi Pembangunan,  
Manajemen dan Akuntansi**  
**Vol. 9 No. 2, September 2023 ISSN 2460-5298, Dan E-ISSN 2621-  
6620, (1-17).**

Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri dari belanja: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Contohnya: honorarium, pembayaran listrik, serta peralatan dan mesin.

b. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi. Contohnya: gaji pokok, pembayaran diskon obligasi Negara, dan subsidi energi (BBM, LPG, tenaga listrik).

c. Belanja modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Kelompok belanja Modal terdiri dari : Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, dan Belanja Gedung dan Bangunan.

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Sujarweni (2015) dalam kutipan Lewadelu (2016) menyatakan APBD adalah rencana keuangan yang dibuat pemerintah daerah setiap tahunnya, disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Undang- undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 17 dijelaskan mengenai ketentuan umum penyusunan APBD: (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Dalam menyusun APBD dimaksud, diupayakan agar belanja operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan,



**Jurnal Kompetitif : Media Informasi Ekonomi Pembangunan,  
Manajemen dan Akuntansi**  
**Vol. 9 No. 2, September 2023 ISSN 2460-5298, Dan E-ISSN 2621-  
6620, (1-17).**

(2) Penyusunan Rancangan APBD sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, (3) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut dalam peraturan daerah tentang APBD, (4) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam peraturan daerah tentang APBD.

**Laporan Realisasi Anggaran**

Oman Rusmana et al. (2017) menyatakan bahwa Laporan Realisasi Anggaran adalah membandingkan anggaran dengan realisasinya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- (1) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi,
- (2) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi: (1) Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat, (2) Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD), dan, (3) Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Efektivitas**

Nordiawan dan Hertianti (2010) menyatakan efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan sebuah kegiatan atau



**Jurnal Kompetitif : Media Informasi Ekonomi Pembangunan,  
Manajemen dan Akuntansi**  
**Vol. 9 No. 2, September 2023 ISSN 2460-5298, Dan E-ISSN 2621-  
6620, (1-17).**

kebijakan dimana ukuran efektivitas merupakan refleksi *output*. Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Berikut adalah faktor penentuan efektif dan efisien (Rondonuwu, 2011): (1) Faktor sumber daya, baik sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana, (2) Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan baik struktur maupun fungsional, (3) Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan, (4) Faktor dukungan kepala aparaturnya dan pelaksanaannya baik pimpinan maupun masyarakat.

### **Efisiensi**

Nordiawan dan Hertianti (2010) menjelaskan bahwa efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan sebuah kegiatan/aktivitas dengan sumber daya (*input*) yang digunakan. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah-rendahnya, atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya (*spending well*). Efisien dapat ditingkatkan dengan empat cara sebagai berikut: (1) Menaikan *output* untuk *input* yang sama, (2) Menaikan *output* lebih besar dari pada proporsi peningkatan *input*, (3) Menurunkan *input* untuk *output* yang sama, dan (4) Menurunkan *input* lebih besar dari pada proporsi penurunan *output*.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Sumber Data**

#### **1) Jenis Data**

Menurut Sugiyono (2017) jenis data ada 2, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat atau gambar. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan satu jenis data yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif yang diperoleh dari tiga



**Jurnal Kompetitif : Media Informasi Ekonomi Pembangunan,  
Manajemen dan Akuntansi**  
**Vol. 9 No. 2, September 2023 ISSN 2460-5298, Dan E-ISSN 2621-  
6620, (1-17).**

Instansi Pemerintah di Kota Mataram berupa data Laporan Realisasi Anggaran dari tahun 2020-2022 serta data lainnya yang diperlukan dalam penelitian.

**2) Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Menurut Sugiyono (2012) bahwa “Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen resmi yang dikeluarkan oleh dinas terkait”. Peneliti menggunakan data sekunder karena peneliti mengumpulkan informasi dari data yang telah diolah oleh pihak yang berwenang dalam bentuk dokumen resmi seperti laporan realisasi, sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi dan dokumen lainnya.

**Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mengumpulkan data, disusun, diinterpretasikan dan dianalisis sehingga memberikan kesimpulan yang jelas dan obyektif terhadap masalah yang ada dan bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis yaitu mengenai kinerja di Dinas Sosial Kota Surabaya dengan dilihat dari segi efektivitas dan efisiensi Laporan Realisasi Anggaran.

**1) Perhitungan Tingkat Efektivitas**

Untuk bisa mengetahui dan mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Dinas Sosial Kota Surabaya, maka digunakan rumus (Mahsun, 2009):

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$



Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-237 tahun 1996, tentang kriteria tingkat kinerja keuangan, penetapan tingkat efektivitas anggaran belanja sebagai berikut: (1) Jika hasil perbandingan lebih dari 100% maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif, (2) Jika hasil pencapaian antara 90%-100% maka anggaran belanja dikatakan efektif, (3) Jika hasil pencapaian antara 80%-90% maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif, (4) Jika hasil pencapaian antara 60%-80% maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif, (5) Jika hasil pencapaian dibawah 60% maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.

## 2) Perhitungan Tingkat Efisiensi

Pada dasarnya efisiensi menunjukkan pengukuran pencapaian output yang maksimum dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Maka digunakan rumus sebagai berikut (Mahsun, 2009):

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung} \times 100}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-237 tahun 1996, tentang kriteria tingkat kinerja keuangan, penetapan tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai berikut: (1) Jika hasil perbandingan lebih dari 100% maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien, (2) Jika hasil pencapaian antara 90%-100% maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien, (3) Jika hasil pencapaian antara 80%-90% maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien, (4) Jika hasil pencapaian antara 60%-80% maka anggaran belanja dikatakan efisien, (5) Jika hasil pencapaian dibawah 60% maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisa Efektivitas

Berikut ini adalah tabel hasil perhitungan tingkat efektivitas dari tiga Instansi



**Jurnal Kompetitif : Media Informasi Ekonomi Pembangunan,  
Manajemen dan Akuntansi**  
**Vol. 9 No. 2, September 2023 ISSN 2460-5298, Dan E-ISSN 2621-  
6620, (1-17).**

Pemerintah Daerah Kota Mataram:

**Tabel 1 Hasil Perhitungan Tingkat Efektivitas pada  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota  
Mataram**

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2020	10.761.604.492	10.137.586.625	94,20
2021	11.849.786.166	10.510.651.053	88,70
2022	12.605.345.866	12.048.362.994	95,58

*Sumber : Data Sekunder, diolah 2023.*

**Tabel 2 Hasil Perhitungan Tingkat Efektivitas pada  
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Mataram**

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2020	4.789.260.501	4.499.074.265	93,94
2021	9.703.671.182	9.084.095.271	93,62
2022	12.760.887.728	12.320.161.202	96,55

*Sumber : Data Sekunder, diolah 2023.*

**Tabel 3 Hasil Perhitungan Tingkat Efektivitas pada  
Dinas Sosial Kota Mataram**

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2020	6.878.836.962	6.649.025.018	96,66
2021	7.716.532.019	7.373.054.869	95,55
2022	13.315.224.174	12.468.370.609	93,64

*Sumber : Data Sekunder, diolah 2023.*

<sup>6</sup> Dari analisis yang telah dilakukan, efektivitas menunjukkan kesuksesan dalam pencapaian tujuan sebuah kegiatan atau kebijakan darimana ukuran efektivitas merupakan refleksi output. Efektivitas terkait antara hasil yang



**Jurnal Kompetitif : Media Informasi Ekonomi Pembangunan,  
Manajemen dan Akuntansi**  
**Vol. 9 No. 2, September 2023 ISSN 2460-5298, Dan E-ISSN 2621-  
6620, (1-17).**

diharapkan dengan hasil yang dicapai sesungguhnya. Hasil perhitungan tingkat efektivitas pada tiga Instansi Pemerintah Kota Mataram yakni:

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dapat dilihat pada tabel 4.1 bahwa pada periode 2020-2022 memiliki tingkat efektivitas diatas 80%. Pada tahun 2020 memiliki tingkat efektivitas sebesar 94,20%, tahun 2021 sebesar 88,70% dan tahun 2022 sebesar 95,58%. (2) Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dilihat dari tabel 4.2 bahwa selama periode anggaran tahun 2020-2022 tingkat efektivitas dikatakan tetap dari tahun ketahun yaitu efektif. Pada tahun 2020 memiliki tingkat efektivitas sebesar 93,94%, 93,62% pada tahun 2021 dan 96,55% pada tahun 2022. (3) Dinas Sosial, jika dilihat pada tabel 4.3 bahwa selama periode anggaran tahun 2020-2022 memiliki tingkat efektivitas diantara 90-100% yang artinya efektif dimana pada tahun 2020 memiliki tingkat efektivitas sebesar 96,66%, tahun 2021 sebesar 95,55% dan tahun 2022 sebesar 93,64%. Tiga Instansi Pemerintah Daerah Kota Mataram tersebut untuk perhitungan anggaran mengenai tingkat efektivitas pelaksanaan belanja setiap tahunnya kriteria dikatakan sudah berjalan secara efektif. Dikatakan efektif karena hasil yang dicapai 90% keatas. Kecuali, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah periode 2021 memiliki tingkat efektivitas sebesar 88,70% yang dikatakan cukup efektif. Setelah itu diketahui jika pada pertengahan bulan maret tahun 2020 Kota Mataram terdampak oleh Virus Covid-19 yang mana membuat beberapa kegiatan tertunda karena adanya Covid-19 namun hal tersebut dapat diatasi sehingga tidak mengakibatkan pengaruh besar terhadap kinerja dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan dalam kriteria efektivitas tersebut. Pada dasarnya naik turunnya tingkat efektivitas anggaran belanja disebabkan karena realisasi anggaran yangdicapai tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Walaupun ada program yang terealisasi tapi tidak sesuai dengan anggaran yang ditetapkan ada juga beberapa kegiatan yang dianggarkan tidak terealisasi, tetapi kegiatan lain yang telah dianggarkan sudah dilaksanakan dengan efektif.



**Jurnal Kompetitif : Media Informasi Ekonomi Pembangunan,  
Manajemen dan Akuntansi**  
**Vol. 9 No. 2, September 2023 ISSN 2460-5298, Dan E-ISSN 2621-  
6620, (1-17).**

Penelitian ini didukung oleh teori Mardiasmo dan hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cindy Kareima Waney.

## 2. Analisa Efisiensi

Berikut ini adalah tabel hasil perhitungan tingkat efisiensi dari tiga Instansi Pemerintah Daerah Kota Mataram:

**Tabel 4 Hasil Perhitungan Tingkat Efisiensi pada Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah Kota Mataram**

Tahun	Realisasi Belanja Langsung (Rp)	Total Realisasi Belanja (Rp)	Persentase
2020	7.364.411.913	10.137.586.625	72,64
2021	8.016.636.325	10.510.651.053	76,27
2022	9.036.272.246	12.048.362.994	75,00

Sumber : Data Sekunder, diolah 2023.

**Tabel 5 Hasil Perhitungan Tingkat Efisiensi pada Dinas Kepemudaan dan  
Olahraga Kota Mataram**

Tahun	Realisasi Belanja Langsung (Rp)	Total Realisasi Belanja (Rp)	Persentase
2020	2.740.814.507	4.499.074.265	60,92
2021	6.470.690.583	9.084.095.271	71,23
2022	9.477.349.847	12.320.161.202	76,93

Sumber : Data Sekunder, diolah 2023.



**Tabel 6 Hasil Perhitungan Tingkat Efisiensi pada Dinas  
Sosial Kota Mataram**

Tahun	Realisasi Belanja Langsung (Rp)	Total Realisasi Belanja (Rp)	Persentase
2020	4.603.932.313	6.649.025.018	69,24
2021	4.450.723.717	7.373.054.869	60,36
2022	9.081.407.712	12.468.370.609	72,84

*Sumber : Data Sekunder, diolah 2023.*

Dari analisis yang telah dilakukan, pada dasarnya efisiensi menunjukkan pengukuran pencapaian output yang maksimum dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya dengan kata lain digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran.

Hasil perhitungan tingkat efisiensi pada tiga Instansi Pemerintah Kota Mataram yakni: (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dapat dilihat pada tabel 4.4 bahwa selama periode anggaran tahun 2020-2022 tingkat efisiensi dikatakan tetap dari tahun ketahun yaitu efisien. Pada tahun 2020 memiliki tingkat efisiensi sebesar 72,64%, tahun 2021 sebesar 76,27% dan tahun 2022 sebesar 75,00%. (2) Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dilihat dari tabel 4.5 bahwa selama periode anggaran tahun 2020-2022 secara keseluruhan termasuk dalam kategori efisien. Dimulai pada tahun 2020 memiliki tingkat efisiensi sebesar 60,92%, tahun 2021 sebesar 71,23% dan tahun 2022 sebesar 76,93%. (3) Dinas Sosial, berdasarkan tabel 4.6 bahwa pada tahun 2020 memiliki tingkat efisiensi sebesar 69,24%, 60,36% pada tahun 2021, dan 72,84% pada tahun 2022. Hasil ini bisa diartikan jika Dinas Sosial Kota Mataram dalam mengelola anggaran belanja dikategorikan efisien. Jika dilihat dari uraian diatas bahwa hasil dari tingkat efisiensi pengelolaan target dan realisasi anggaran belanja pada Bappeda, Dispora dan Dinsos tahun 2020-2022 dapat dikatakan efisien dalam melakukan pengelolaan anggaran belanja serta menghemat



**Jurnal Kompetitif : Media Informasi Ekonomi Pembangunan,  
Manajemen dan Akuntansi**  
**Vol. 9 No. 2, September 2023 ISSN 2460-5298, Dan E-ISSN 2621-  
6620, (1-17).**

terjadinya pemborosan biaya sehingga dapat diberikan kepada kegiatan dimasa mendatang. Sehingga dalam pengelolaan anggaran belanja yang terjadi pada tahun 2020-2022 telah berhasil memenuhi syarat efisien yaitu menggunakan *input* tertentu untuk menghasilkan *output* yang optimal. Penelitian ini didukung oleh teori Mardiasmo dan hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cindy Kareima Waney.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka disimpulkan bahwa:

- 1) Tingkat atau kriteria efektivitas realisasi anggaran belanja yang tertinggi pada tahun 2020 yaitu Dinas Sosial dengan%tase sebesar 96,66% sedangkan yang terendah adalah DinasKepemudaan dan Olahraga dengan%tase sebesar 93,94%. Pada tahun 2021 tingkat atau kriteria efektivitas realisasi anggaran belanja yang tertinggi adalah Dinas Sosial dengan%tase sebesar 95,55% sedangkan yang terendah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan%tase sebesar 88,70%. Pada tahun 2022 tingkat atau kriteria efektivitas yang tertinggi adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan%tase sebesar 96,55% sedangkan yang terendah adalah Dinas Sosial dengan%tase sebesar 93,64%. Pada dasarnya naik turunnya tingkat efektivitas anggaran belanja disebabkan karena realisasi anggaran yang dicapai tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Walaupun ada program yang terealisasi tapi tidak sesuai dengan anggaran yang ditetapkan ada juga beberapa kegiatan yang dianggarkan tidak terealisasi.
- 2) Tingkat atau kriteria efisiensi realisasi anggaran belanja yang terendah pada tahun 2020 yaitu Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan%tase sebesar 60,92% sedangkan yang tertinggi adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan%tase sebesar 72,64%. Pada tahun 2021 tingkat atau kriteria efisiensi realisasi anggaran belanja yang terendah adalah Dinas Sosial dengan%tase sebesar 60,36% sedangkan yang tertinggi adalah Badan



**Jurnal Kompetitif : Media Informasi Ekonomi Pembangunan,  
Manajemen dan Akuntansi**  
**Vol. 9 No. 2, September 2023 ISSN 2460-5298, Dan E-ISSN 2621-  
6620, (1-17).**

Perencanaan Pembangunan Daerah dengan%tase sebesar 76,27%. Pada tahun 2022 tingkat atau kriteria efisiensi yang terendah adalah Dinas Sosial dengan%tase sebesar 72,84% sedangkan yang tertinggi adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan%tase sebesar 76,93%. Selama periode 2020-2022 tingkat atau kriteria efisiensi pada Bappeda, Dispora, dan Dinsos secara keseluruhan berada dalam kategori efisien. Hasil ini memberitahukan bahwa Instansi-instansi tersebut telah berhasil dalam mengelola anggaran belanja dengan menggunakan *input* tertentu untuk menghasilkan *output* yang optimal.

**SARAN**

Berdasarkan dari hasil penelitian, maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

- 1) Diharapkan penelitian selanjutnya apabila akan melakukan penelitian di tempat penelitian yang sama diharapkan menggunakan variabel-variabel yang belum disebutkan dalam penelitian ini, seperti variabel rasio kemandirian, rasio desentralisasi, rasio pertumbuhan pendapatan, dan lain-lain.
- 2) Diharapkan SKPD lain untuk lebih memperhatikan dalam mempublikasikan Laporan Realisasi Anggaran secara tepat waktu dan lengkap dari tahun ke tahun.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Klychova, G. S. 2014. *Budgeting Efficiency for Cost Control Purpose in Management Accounting System*. Kazan State Universty Rusia.
- Lewadelu, G. 2016. Evaluasi Penatausahaan, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi.
- Mahsun, M. 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPF. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI. Yogyakarta.
- Nordiawan., D., dan Hertanti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua.



**Jurnal Kompetitif : Media Informasi Ekonomi Pembangunan,  
Manajemen dan Akuntansi**  
**Vol. 9 No. 2, September 2023 ISSN 2460-5298, Dan E-ISSN 2621-  
6620, (1-17).**

Salemba Empat. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. *Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Jakarta. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006. *Pengelolaan  
Keuangan Daerah.* Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 Perubahan Atas 13 Tahun 2006  
*Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan  
Keuangan Daerah* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. *Pengelolaan  
Keuangan Daerah.*Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-237 Tahun 1996. *Tentang  
Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.* Jakarta.

Rai, I. G. N. 2010. *Audit Kinerja Pada Sektor Publik.* Salemba Empat. Jakarta.

Rusmana, O., D. Setyaningrum., Yuliansyah., Maryani. 2017. *Akuntansi  
Pemerintah Daerah.*

Edisi Pertama. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung :  
Alfabeta, CV.Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis.* Alfabeta. Bandung.

Sujarweni., V. W. 2015. *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta. Pustaka Baru Press.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003. *Keuangan Negara.* Jakarta.

# Jurnal\_Nasional-Analysis\_Realisasi\_Anggaran.pdf

## ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

21%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://caridokumen.com">caridokumen.com</a> Internet Source	2%
2	Submitted to Defense University Student Paper	2%
3	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	2%
4	<a href="http://aoktarina.blogspot.com">aoktarina.blogspot.com</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	2%
6	<a href="http://journal.unita.ac.id">journal.unita.ac.id</a> Internet Source	2%
7	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	2%
8	<a href="http://repository.unibos.ac.id">repository.unibos.ac.id</a> Internet Source	2%
9	<a href="http://eprints.mercubuana-yogya.ac.id">eprints.mercubuana-yogya.ac.id</a> Internet Source	2%

10

docplayer.info

Internet Source

2%

---

Exclude quotes      On

Exclude matches      < 2%

Exclude bibliography      On

# Jurnal\_Nasional-Analysis\_Realisasi\_Anggaran.pdf

---

## GRADEMARK REPORT

---

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

**/0**

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---

PAGE 8

---

PAGE 9

---

PAGE 10

---

PAGE 11

---

PAGE 12

---

PAGE 13

---

PAGE 14

---

PAGE 15

---

PAGE 16

---

PAGE 17

---